



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/421/BUP-PASBAR/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

B. Sekretaris

1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2023;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

- hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 5. Menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 6. Menganalisa dan mengevaluasi implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
 7. Menganalisa dan mengevaluasi kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;
 8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis) dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
 9. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat 2023;
 10. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
 11. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
 12. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 kepada pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Agustus 2022

 **BUPATI PASAMAN BARAT,**

H. HAMSUARDI, S.Ag

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 188.45/421/BUP-PASBAR/2022
Tanggal : 11 Agustus 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Kepala	Pengarah
Sekretaris	Ketua
Perencana	Sekretaris
Analis Keuangan Pusat/Daerah	Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
Kabid. Sarana dan Prasarana Pertanian	Koordinator
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
Analis Prasarana	Anggota
Kabid. Penyuluhan Pertanian	Koordinator
Penyuluh Pertanian	Anggota
Kepala Bidang Peternakan	Koordinator
Pengawas Bibit Ternak	Anggota
Staf Perencanaan	Sekretariat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Agustus 2022

 **BUPATI PASAMAN BARAT,**

H. HANISUARDI, S.Ag

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat untuk jangka waktu lima tahun (2021-2026) akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dimana program dan kegiatan mengacu pada Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang juga dipedomani oleh Kementerian Pertanian RI dan Provinsi.

Selanjutnya, Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/ 12 /BUP-PASBAR/2023 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sarana dan Prasarana Pertanian, Penyuluh Pertanian, maupun Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 : *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 : *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

- 1.3 : *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 : *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 : *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 : *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 : *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 : *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

- 2.5 : *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 : *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 : *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD
- 3.3 : *Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 (Lima) Program yang terdiri dari 16 (Enam belas) Kegiatan dan 40 (Empat puluh) Sub Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2020. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan tahun 2021 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2021), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada umumnya realisasi program/kegiatan sudah mencapai target. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi produksi padi pada tahun 2021 tidak mencapai target hal disebabkan karena adanya luas baku sawah yang menurun dari 9.157 Ha menjadi 8.873 Ha selain itu terjadi alih fungsi lahan dari sawah ke komoditi lain misalnya di Kecamatan Kinali karena kurangnya pasokan air untuk sementara lahan sawah ditanami tanaman hortikultura (cabe, pepaya, kacang dll) .

Untuk komoditi jagung pada tahun 2021 produksinya sedikit melebihi target disamping adanya bantuan benih dari dana APBN juga terdapat integrasi dengan sawit yang umurnya kurang dari 2 tahun. Namun jika sawit sudah berumur 2 tahun maka tidak bisa lagi ditanami jagung.

Produksi cabe tahun 2021 jauh dari target hal ini disebabkan iklim yang ekstrim seperti di Luhak Nan Duo hasil kurang maksimal, terjadi banjir di Ranah Batahan. Selain itu petani banyak yang menggunakan bibit turunan varietas lokal sehingga rentan terserang hama penyakit (antraknosa dan layu fusarium).

Pada komoditi peternakan yang tidak mencapai target adalah populasi kambing hal ini disebabkan karena peternak kambing semakin sedikit sementara pemotongan untuk aqiqah terus dilakukan menyebabkan populasinya berkurang.

Lain halnya dengan unggas yang populasinya melebihi target karena pada tahun 2021 ada bantuan dari propinsi 1.000 ekor ayam dan 1.000 ekor itik.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dari realisasi capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan berdasarkan interval nilai realisasi kinerja dikategorikan tinggi dengan nilai 90%.

TABEL 2.1. (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			(Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahunn-1) (AKUMULASI 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100	9	10= 5+7+9	11= 10/4 x 100%
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton) komoditas:								
		Padi	126.007	147.471	149.315	109.883	74	117.343	117.343	93,12
		Jagung	299.752	262.510	264.877	271.047	102	283.005	283.005	94,41
		Jumlah Produksi Hortikultura (ton) komoditas:							-	
		Cabai	9.828	9.585	9.454	9.591	101	9.648	9.648	98,17
		Jeruk	10.420	12.303	12.353	14.579	118	9.888	9.888	94,89
		Alpukat	5.396	2.397	2.408	17.141	712	3.396	3.396	62,94
		Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya							-	
		Padi	4,90	4,6	4,7	4,8	103	4,7	4,7	95,92
		Persentase ketersediaan bibit ternak	31%	26%	26%	26%	100	27%	27%	87,10
		Persentase ketersediaan bibit/benih hijauan pakan ternak	45%	15%	15%	15%	100	20%	20%	44,44

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)	212	20	20	20	100	30	70	33,02
a Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Frekuensi pengawasan sarana pendukung pertanian (bulan)	12	12	12	12	100	12	12	100,00
b Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (bulan)	12	12	12	12	100	12	12	100,00
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah benih unggul bersertifikat	30	3	5	5	100	5	13	43
a Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan (varietas)	3	3	3	3	100	3	3	100
b Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah varietas yang meningkat kualitasnya (varietas)	3	3	3	3	100	3	3	100
3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumber dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan produksi ternak (ton)	10.230	1680	1680	1.690	101	1.690	5.060	49,46
a Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1. Jumlah bantuan ternak yang diserahkan ke masyarakat	8.576		1.412	1.414	100	1.420	2.834	33,05

2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	1. JUT: 50 Km 2. Dam parit:35 unit 3. JITUT ; 100 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskesmas: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	1. JUT: 10 Km 2. Dam parit:48 unit 3. JITUT ; 1543 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskesmas: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	1. JUT: 8 Km 2. Dam parit:5 unit 3. JITUT ; 20 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskesmas: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	1. JUT: 9 Km 2. Dam parit: 2 unit 3. JITUT ; 22 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskesmas: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	1. 100% 2. 40% 3. 110% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100%	1. JUT: 10 Km 2. Dam parit:15 unit 3. JITUT ; 20 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskesmas: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	1. JUT: 19 Km 2. Dam parit: 50 unit 3. JITUT ; 1.565 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskesmas: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	1.95% 2. 63% 3. 35% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100%
	1. Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Indeks Pertanian (%)	0,6%	0,2%	0,2%	0,2%	100	0,2%	0,6%	100
	a Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B,	Jumlah dokumen yang disusun(dokumen)	1					1	1	100
	b Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya (bulan)	12	12	12	12	100	12	12	100
	2. Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	120	13	20	13	100	20	46	38
	1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab	100	2	3	2	80	20	24	24
	2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	25	9	8	9	113	5	23	92
	3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun	80	2	2	2	100	15	19	24
	4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/dipelihara	7 Puskesmas 1 BBTPH			-	-	7 Puskesmas 1 BBTPH	-	

3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1		85%	55%	65	85%	55%	64,71
		Peningkatan populasi komoditas ternak								
		Sapi	22.521	19.929	19.929	19.929	100	20.793	20.793	92,33
		Kambing	16.138	14.056	14.056	14.056	100	14.750	14.750	91,40
		Unggas	807.334	720.934	735.334	1.188.499	162	749.743	749.743	92,87
	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pengendalian Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS) (bulan)	12	12,0	12,0	12,0	100,0	12,0	12,0	100,0
	a Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pengendalian kejadian/jenis penyakit (kejadian)	5.261		5.261	5.261	100,0	5.261	5.261	100,0
	2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan Jasa Medik Veteriner (kecamatan)	11	11	11	11	100,0	11,0	11,0	100,0
	a Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah lokasi pelayanan kesehatan hewan (UPTD)	2	2	2	2	100	2	2	100
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani 2. Persentase penyuluh dan petani terlatih	1. 5% 2. 5 %		1. 1% 2. 1 %	1. 1% 2. 1 %	100,0	1. 1% 2. 1 %	1. 1% 2. 1 %	100,00
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	11,0	11,0	11,0	11,0	100	11,0	11,0	100,0

	a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/bimtek (orang)	101		101,0	38,0	38	101,0	38,0	37,62
	b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan (kelompok)	100,0		100,0	113,0	113	100,0	113,0	113,00
	c	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan (bulan)	12,0		12,0	12,0	100,0	12,0	12,0	100,0
6	5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	100,0		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	1,0		100%	100%	100%	100%	100%	100,00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan DTPHP yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026; IKU Tahun 2022-2026; Renja Perubahan Tahun 2021; Renja Tahun 2022; RTP Tahun 2021; PK Tahun 2021). 2. Jumlah database	42,0	7,00	7	7	100	7,00	21	50,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	1,0		100%	100%	100%	100%	100%	100,00
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan (PNS)	79,0		79,00	79,00	100	79,00	79,00	100,00
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran (orang)	7,0		7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan (bulan)	12,0		12,00	12,00	100	12,00	12,00	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DTPHP (unit)	1.315,0		1.315,00	1.315,00	100	1.315,00	1.315,00	100
1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan administrasi dan pengamanan BMD pada DTPHP	3,0		3,00	3,00	100	3,00	3,00	100
2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD (orang)	2		2,00	2,00	100	2,00	2,00	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek (orang)	48		48,00	48,00	100	48,00	48,00	100
1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya (orang)	44		44,00	38,00	100	38,00	38,00	86,36
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai (orang)	24		4,00	4,00	100	4,00	4,00	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	1. 100% 2. 2 unit 3. 100 %		1. 100% 2. 1 paket 3.12 bulan	1. 100% 2. 1 paket 3.12 bulan	100	1. 100% 2. 2 unit 3. 100 %	1. 100% 2. 1 paket 3.12 bulan	100

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor (paket)	6		1,00	1,00	100	1,00	1,00	16,67
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan (paket)	6		1,00	1,00	100	1,00	1,00	16,67
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (paket)	6		1,00	1,00	100	1,00	1,00	16,67
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Disbun yang dibutuhkan (paket)	6		1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	16,67
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD (unit)	77,00		2,00	2,00	100,00	4,00	2,00	2,60
1	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel (unit)	63,00		-	-	-	2,00	-	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran (unit)	12,00		2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	16,67
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (paket)	6,00		-	-	-	1 paket	-	-

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	1,00		100%	100%	100%	100%	100%	100,00
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor (bulan)	12,00		12,00	12,00	100	12,00	12,00	100,00
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor	2 THL 1 Paket		2 THL 1 Paket	2 THL 1 Paket	100	2 THL 1 Paket	2 THL 1 Paket	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (unit)	166,00		166	166	100	166	166	100,00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR (unit)	74,00		74,00	74,00	100	74,00	74,00	100,00
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	74,00		74,00	74,00	100	74,00	74,00	100,00
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang akan dilakukan pemeliharaan (unit)	2,00		-	-	-	2,00	-	-
	4 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang mendapat pemeliharaan (unit)	90,00		-	-	-	10,00	-	-
	5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara (unit)	30,00		30,00	30,00	100	30,00	30,00	100
	6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi (paket)	6,00		1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
		TOTAL					90%			81

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan dalam pengentrian anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Adanya keterlambatan pada penyusunan dan pengesahan anggaran dan anggaran perubahan sehingga mengakibatkan pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kekurangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak kegiatan.
4. Kurangnya pengawasan terhadap tanggal kadaluarsa benih sehingga benih yang diterima petani ada yang sudah expire.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Meningkatkan pengawasan kelapangan bersama BPSB dalam pemeriksaan benih
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana SKPD.
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi daerah, Renstra dan Renja.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7. Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antar apa yang dibutuhkan dengan yang dianggarkan, harga antara barang/jasa yang ada di lapangan dengan terdapat di DPA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor pertanian. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang pertanian telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal.

Tabel 2.2.1 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Pasaman Barat

NO	Indikator Tujuan/ Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	5		6	7	8	9	10	11	12	9	10	
1	% Peningkatan/ Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura			(6,67)	5,13	1,86	1,07	(8,81)		1,86	1,07	
	Padi			114.980	117.343	119.980	121.230	109.883		119.980	121.230	
	Jagung			265.551	283.005	287.556	290.081	266.911		287.556	290.081	
2	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya											
	Padi			4,65	4,70	4,75	4,80	4,80		4,75	4,80	
3	Peningkatan produksi komoditas Tanaman											
	Cabai (Ton)			9.726	9.896	10.069	10.245	5.689		10.069	10.245	
	Jeruk (Ton)			9.718	9.888	9.892	10.065	20.846		9.892	10.065	
	Alpukat (Ton)			2.896	3.396	3.896	4.396	24.196		3.896	4.396	
4	% Peningkatan/ Penurunan populasi komoditas ternak :			1,98	1,94	1,90	1,86	1,98		1,90	1,86	
	Sapi			20.229	20.529	20.829	21.129	20.360		20.829	21.129	
	Kambing			14.266	14.476	14.686	14.896	13.877		14.686	14.896	
	Unggas			735.334	749.743	764.134	778.534	1.188.499		764.134	778.534	
5	Peningkatan nilai SAKIP			B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	B (68,63)		BB (71)	BB (73)	
	Level Maturitas SPIP			2,11	2,35	2,48	2,6	2,11		2,48	2,6	
	Jumlah Temuan BPK			7	6	5	4	7		5	4	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi produksi padi pada tahun 2021 tidak mencapai target hal disebabkan karena adanya luas baku sawah yang menurun dari 9.157 Ha menjadi 8.873 Ha selain itu terjadi alih fungsi lahan dari sawah ke komoditi lain misalnya di Kecamatan Kinali karena kurangnya pasokan air untuk sementara lahan sawah ditanami tanaman hortikultura (cabe, pepaya, kacang dll) .

Untuk komoditi jagung pada tahun 2021 produksinya sedikit melebihi target disamping adanya bantuan benih dari dana APBN juga terdapat integrasi dengan sawit yang umurnya kurang dari 2 tahun. Namun jika sawit sudah berumur 2 tahun maka tidak bisa lagi ditanami jagung.

Produksi cabe tahun 2021 jauh dari target hal ini disebabkan iklim yang ekstrim seperti di Luhak Nan Duo hasil kurang maksimal, terjadi banjir di Ranah Batahan. Selain itu petani banyak yang menggunakan bibit turunan varietas lokal sehingga rentan terserang hama penyakit (antraknosa dan layu fusarium).

Pada komoditi peternakan yang tidak mencapai target adalah populasi kambing hal ini disebabkan karena peternak kambing semakin sedikit sementara pemotongan untuk aqiqah terus dilakukan menyebabkan populasinya berkurang.

Lain halnya dengan unggas yang populasinya melebihi target karena pada tahun 2021 ada bantuan dari propinsi 1.000 ekor ayam dan 1.000 ekor itik.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam meningkatkan produksi tanaman pangan salah satu yang menjadi penghambat adalah adanya alih fungsi lahan. Guna menghambat laju konversi lahan sawah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat sudah mengeluarkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 9 Tahun 2016.

Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sebagai komoditi andalan dan unggulan di Propinsi Sumatera Barat dalam penetapannya diatur oleh Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-849-2019 Tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dan ditindaklanjuti juga dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.46/204/DTPHP-III/2021 Tentang Penetapan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, maka sentra-sentranya meliputi :

a) Kawasan Tanaman pangan

- Padi meliputi Kec. Talamau, Kec. Kinali, Kec. Lembah Melintang dan Kec. Ranah Batahan
- Kawasan jagung meliputi Kec. Pasaman, Kec. Luhak Nan Duo, Kec. Kinali, Kec. Lembah Melintang
- Kawasan ubi jalar meliputi Kec. Talamau

b) Kawasan Hortikultura

- Kawasan jeruk meliputi Kec. Pasaman dan Kec. Lembah Melintang
- Kawasan sayur lainnya meliputi Kec. Luhak Nan Duo
- Kawasan aneka cabai meliputi Kecamatan Talamau
- Kawasan buah lainnya meliputi Kec. Luhak Nan Duo (alpukat)
- Kawasan manggis meliputi Kec. Talamau, Gunung Tuleh dan Pasaman

c) Kawasan Peternakan

- Kawasan peternakan sapi potong meliputi Kec. Kinali, Kec. Luhak Nan Duo, Kec. Pasaman dan Kec. Sasak Ranah Pasisie
- Kawasan Peternakan Kerbau meliputi Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kec. Kinali dan Kec. Talamau
- Kawasan Peternakan Kambing meliputi Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kec. Kinali, Kec. Talamau, Kec. Sungai Beremas, Kec. Pasaman
- Kawasan Peternakan Unggas meliputi Kec. Kinali, Kec. Talamau, Kec. Pasaman, Kec. Ranah Batahan, Kec. Lembah Melintang, Kec. Sungai Aur, Kec. Koto Balingka dan Kec. Luhak Nan Duo.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, menyebabkan luas budidaya pertanian semakin berkurang.
- Kuantitas penggunaan benih unggul bersertifikat oleh petani masih kurang, sehingga produktivitas kurang meningkat.

- c. Belum banyak kelompok tani yang dapat mengimplemtasikan manajemen kelembagaan tani secara optimal.
- d. Sebagian petani belum mampu merubah mindset (perilaku) untuk lebih maju karena kurangnya penguasaan teknologi terutama teknologi informasi.
- e. Sarana irigasi belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menjamin ketersediaan air untuk menunjang usaha budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- f. Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pertanian perkotaan, dirasakan masih kurang dimana hanya beberapa orang yang aktif berperan. Selain itu dukungan dari pemangku wilayah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat belum optimal untuk mendorong warga mengembangkan pertanian di wilayahnya.
- g. Kabupaten Pasaman Barat rentan terhadap penyebaran penyakit hewan menular dikarenakan adanya pasar ternak sebagai pemasok ternak dari daerah lain.

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, visi dan misi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan maka isu-isu strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan SDM pertanian melalui penguatan kelembagaan petani dan penyuluh
- 2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
- 3. Peningkatan pendapatan petani melalui nilai tambah pertanian
- 4. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan komoditi peternakan
- 5. Pengendalian serangan OPT dan dampak bencana
- 6. Alih fungsi lahan sawah ke komoditi lainnya dan konversi lahan pertanian
- 7. Peningkatan populasi ternak
- 8. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik lokal.

Untuk itu, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.
- b. Infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum optimal.
- c. Pengamanan produksi dari gagal panen akibat bencana dan serangan OPT.
- d. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.
- e. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan.
- f. Semakin terbatasnya tenaga kerja terampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
- g. Kurangnya jumlah SDM.
- h. Masuknya komoditas pertanian impor yang menyaingi produk petani.
- i. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.
- j. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian semakin mengkhawatirkan.
- k. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
- l. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk perbaikan infrastruktur sehingga mengurangi beban APBD Provinsi dan Kabupaten.
- c. Adanya usaha pengamanan produksi (asuransi padi dan sapi) dari pemerintah akibat gagal panen dampak serangan OPT dan bencana.
- d. Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta keterampilan petani melalui bimtek, kursus, magang dan sekolah lapang yang sudah banyak dilaksanakan melalui kegiatan IPDMIP.
- f. Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
- g. Optimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan sapa usaha tani dan mendorong dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian berkelanjutan (Perda LP2B sudah ada).
- h. Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi plasma nutfah ternak kerbau maligi

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

1. Untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura bisa dilakukan secara intensifikasi dengan melakukan beberapa hal seperti melakukan pemupukan, ketersediaan air cukup, melakukan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman, pemakaian bibit unggul, pengolahan tanah yang baik.

2. Dalam antisipasi konversi lahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat sudah membuat perda LP2B tahun 2016 namun kondisi lahan saat ini sudah jauh berbeda maka dilakukan updating peta LP2B kemudian tahun 2023 dianggarkan dana untuk revisi perda. Diharapkan dengan adanya perda dapat diterapkan sehingga tidak terjadi lagi alih fungsi lahan.
3. Penyuluh diharapkan dapat merubah mindset petani untuk mau melakukan minimal 2x tanam dalam setahun hal ini dapat meningkatkan produksi. Untuk menarik minat petani perlu diadakan acara2 ceremonial dengan menghadirkan Bupati/Pejabat lainnya. Misalnya dengan memberikan reward/doorprize kepada petani.
4. Setiap kecamatan hendaknya menggali potensi atau menetapkan satu komoditi unggulan yang berkelanjutan sehingga perangkat daerah dapat mengintervensi dana untuk melengkapi sarana dan prasarana serta pemasarannya. Namun pelaksanaannya harus sudah dimulai dari masyarakat itu sendiri.
5. Perlu adanya pendataan petani/buruh tani yang belum tergabung dalam kelompok tani karena sasaran bantuan adalah kelompok tani. Karena umumnya petani miskin adalah buruh tani sehingga butuh penanganan khusus dengan memberikan keahlian/sarana.
6. Memperbanyak penyuluh swadaya (berasal dari petani) sebagai kader penyuluh yang sudah dibekali keahlian sehingga dalam penanganan awal terhadap hama penyakit tanaman serta penyakit hewan sehingga jika ada kejadian penanganannya cepat diatasi saat petugas tidak ditempat.
7. Untuk melestarikan sumber daya genetik lokal perlu adanya keberlanjutan kegiatannya khususnya yang sudah ada pelepasan varietas seperti Kacang Tigo Ampek, Padi Sigudang dan Alpukat Giri Maju. Selain itu terhadap kearifan lokal Kerbau Maligi yang akan dilakukan kajiannya.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 27.990.564.286,- (*Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah*) tahun 2023. Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				27.990.564.286					27.990.564.286	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.593.389.521	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.609.913.416	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	57.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	57.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	79 PNS	7.748.239.521	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	79 PNS	7.766.763.416	Ada penambahan ASN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah ASN penatausahaan BMD	2 orang	72.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah ASN penatausahaan BMD	2 orang	80.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	4 orang	45.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	4 orang	35.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	213.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	213.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	2 unit	40.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	2 unit	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasbar	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	113.150.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasbar	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	113.150.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	74 unit	305.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	74 unit	305.000.000	
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	"1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan temak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,153003	9.177.300.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	"1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan temak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,153003	9.177.300.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Pasbar	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	121525b3u,2la 6n58 ton	3.033.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Pasbar	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	121525b3u,2la 6n58 ton	3.033.000.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	4 varietas	1.654.300.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	4 varietas	1.654.300.000	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah kecamatan yang diawasi	11 kecamatan	280.000.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah kecamatan yang diawasi	11 kecamatan	280.000.000	
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecur	Kab. Pasbar	Jumlah pemeriksaan toko obat hewan	21	310.000.000	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecur	Kab. Pasbar	Jumlah pemeriksaan toko obat hewan	21	310.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Frekuensi pengawasan benih	121525b3u,2la 6n58 ton	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Frekuensi pengawasan benih	121525b3u,2la 6n58 ton	150.000.000	

	Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pasbar	Peningkatan produksi temak	121575030,2ton 65n8 ton	3.750.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pasbar	Peningkatan produksi temak	121575030,2ton 65n8 ton	3.750.000.000	
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69,8,15,20,11 unit,unit,unit	6.297.500.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69,8,15,20,11 unit,unit,unit	6.297.500.000	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Pasbar	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)		550.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Pasbar	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)		550.000.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Pasbar	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	7,1,1,1,1 km,k u ² n ⁰ it ^k ,u ^m nit,u nit	5.747.500.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Pasbar	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	7,1,1,1,1 km,k u ² n ⁰ it ^k ,u ^m nit,u nit	5.747.500.000	
4.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab. Pasbar	% penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	85 %	693.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab. Pasbar	% penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	85 %	803.476.105	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah pengendalian kejadian/jenis penyakit	5261 kejadian	93.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah pengendalian kejadian/jenis penyakit	5261 kejadian	203.476.105	Ada kasus PMK
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah lokasi pelayanan hewan	11 Kecamatan	600.000.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah lokasi pelayanan hewan	11 Kecamatan	600.000.000	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	10,10,8 %	210.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	10,10,8 %	83.000.000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT	150 orang	210.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT	50 orang	83.000.000	Pengurangan peserta
6.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Pasbar	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh	1-1 %	3.019.374.765	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Pasbar	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh	1-1 %	3.019.374.765	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasbar	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	11 BPP	3.019.374.765	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasbar	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	11 BPP	3.019.374.765	
					27.990.564.286						27.990.564.286

Dengan berkembangnya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, maka membutuhkan anggaran untuk pembelian obat-obatan terkait pemeriksaan hewan yang terjangkit dan juga pengamanan lalu lintas hewan. Untuk itu ada sub kegiatan yang dikurangi dananya dari kegiatan penanggulangan bencana dan dipindahkan untuk kegiatan PMK. Selain itu juga ada penambahan ASN baru pindah sehingga ada penambahan di sub kegiatan gaji dan tunjangan.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 27.990.564.286,- (*Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah*) tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dan RPJMD Periode 2021-2026. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan, maka kebutuhan anggaran tidak ada perubahan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2023, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang dirangkum dapat dilihat dalam Tabel 2.4

Tabel 2.3. (T-C. 32)
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2023
Berdasarkan Hasil Musrenbang

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1						2	3	4	5	6
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1 . % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas:padi, jagung) 4. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)		
3	27	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)		
3	27	02	2.01	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Frekuensi pengawasan sarana pendukung pertanian		
						Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor, Cornsheller, Thresher, Sprayer, Rice Transplanter, Combine Harvester, dll)	Talamau		1 unit	Handtraktor
							Sungai Aur		1 unit	Alat pasca panen
3	27	02	2.06			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumber dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Peningkatan produksi ternak (ton)		
3	27	02	2.06	01		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		Jumlah bantuan ternak yang diserahkan ke masyarakat		
						Pengadaan bibit ternak sapi/ kambing/unggas	Talamau		50 ekor	sapi
							Sungai Aur		100 ekor	sapi

3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun		
3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)		
3	27	03	2.02	01		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Talamau	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab	2 paket	
							Pasaman		1 paket	
3	27	03	2.02	03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jumlah jalan usaha tani yang dibangun		
						Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani	Talamau		2 paket	
							Pasaman		3 paket	
							Koto Balingka		3 paket	
							Sungai Aur		2 paket	
							Gunung Tuleh		1 paket	
							Kinali		1 paket	
							Sasak Ranah Pasisie		1 paket	
3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani 2. Persentase penyuluh dan petani terlatih		
3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian		
3	27	07	2.01	04		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan		
						Pelatihan Petani/Peternak	Kinali		1 paket	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Adapun sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan prioritas pembangunan Propinsi terletak pada program dan kegiatan yang diusulkan melalui aplikasi “Sakato Plan” sedangkan untuk Dana Tugas Pembantuan dapat diusulkan melalui e-Proposal dan kegiatan DAK Penugasan melalui aplikasi e-Krisna. Sinkronisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian, Provinsi dan Kabupaten

NO	KEMENTERIAN PERTANIAN		DINAS TANAMAN PANGAN HORITKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT		DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT	
	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Penyediaan Benih dan Bibit serta				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta

		Peningkatan Produksi Ternak				Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
						Pengawasan Obat Hewan di tingkat Pengecer
		Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian
		Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian				Pembangunan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Kewenangan Provinsi	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah kabupaten/kota
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

				dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan misi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2023 adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2023

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sektor tanaman pangan hortikultura dan peternakan			PDRB per Kapita ADHB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (Rp.juta)	36,17	37,71	39,33	41,53	43,22	45,46	36,17
			1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura		(6,67)	5,13	1,86	1,07	1,86	1,82
				Padi	147.471	114.980	117.343	119.980	121.230	123.654	126.007
				Jagung	262.510	265.551	283.005	287.556	290.081	294.897	299.752
				Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya							
				Padi	4,60	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
				Peningkatan produksi komoditas Tanaman Hortikultura (Ton):							
				Cabai (Ton)	9.558	9.726	9.896	10.069	10.245	10.425	10.607
				Jeruk (Ton)	9.718	9.718	9.888	9.892	10.065	10.241	10.420
				Alpukat (Ton)	2.396	2.896	3.396	3.896	4.396	4.896	5.396
			2 Meningkatnya populasi ternak	% Peningkatan/Penurunan populasi komoditas ternak :	-1,81	1,98	1,94	1,90	1,86	1,83	1,80
				Sapi	19.929	20.229	20.529	20.829	21.129	21.429	21.429
				Kambing	14.056	14.266	14.476	14.686	14.896	15.106	15.316
				Unggas	720.934	735.334	749.743	764.134	778.534	792.934	807.334
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DTPHP			Peningkatan nilai SAKIP	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (78)
				Level Maturitas SPIP	1,98	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
				Jumlah Temuan BPK	8	7	6	5	4	3	2
			1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPHP	Peningkatan nilai SAKIP	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (78)
				Level Maturitas SPIP	1,98	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
				Jumlah Temuan BPK	8	7	6	5	4	3	2

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 (Lima) Program yang terdiri dari 19 (Enam belas) Kegiatan dan 50 (Empat puluh) Sub Kegiatan.

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan Jumlah Produksi Hortikultura (ton) komoditas: Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya Persentase ketersediaan bibit ternak Persentase ketersediaan bibit/benih hijauan pakan ternak
	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)
	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Frekuensi pengawasan sarana pendukung pertanian
	2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
	2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah benih unggul bersertifikat
	3 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan
	4 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah varietas yang meningkat kualitasnya
	5 Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah varietas yang dimanfaatkan SDG nya
	3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan produksi ternak (ton)
	6 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	1. Jumlah kecamatan yang diawasi
	7 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah kecamatan yang dipantau peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
	4. Pengawasan Obat Hewan di tingkat Pengecur	Jumlah pemeriksaan toko obat hewan
	8 Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Jumlah pemeriksaan toko obat hewan
	9 Penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan	Jumlah pengawasan atas penyimpangan pada toko obat hewan

	5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kawasan ternak yang diawasi
	10 Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	Frekuensi pengawasan terhadap kawasan ternak
	6. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumber dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan produksi ternak (ton)
	11 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1. Jumlah bantuan ternak yang diserahkan ke masyarakat
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun
	6. Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)
	12 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Jumlah dokumen yang disusun
	13 Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B,	Jumlah dokumen yang disusun
	14 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
	7. Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)
	15 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab
	16 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun
	17 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun
	18 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dibangun (unit)
	19 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan yang dibangun/dipelihara
	20 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/dipelihara
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
		Peningkatan populasi komoditas ternak
	8. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pengendalian Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS)
	21 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pengendalian kejadian/jenis penyakit

	9. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan Jasa Medik Veteriner
	22 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah lokasi pelayanan kesehatan hewan
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)
	10. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	23 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT
	24 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah petani yang mendaftar Asuransi Usaha Tanaman Pangan (AUTP) (Ha)
4.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani 2. Persentase penyuluh dan petani terlatih
	11. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian
	25 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/bimtek
	26 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan
	27 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan
	28 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah
	12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran
	29 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DTPHP yang disusun (Dokumen Renstra, Renja, RTP, PK, RKA, RKA Perubahan), buku database
	30 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD, LAKIP)
	13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan
	31 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan
	32 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran
	33 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan

14. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola
34 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan administrasi dan pengamanan BMD pada DTPHP
35 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD
15. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek
36 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
37 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya
38 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai
16. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
39 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor
40 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan
41 Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan
42 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map yang dibutuhkan
43 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti
17. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD
44 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel
45 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran
46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor
47 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor
48 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor
19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
49 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan
50 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
51 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang akan dilakukan pemeliharaan
52 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang mendapat pemeliharaan
53 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara
54 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi

Dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 serta Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pasaman Barat yang dijabarkan dalam program-program prioritas Bupati Pasaman Barat
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya peningkatan SDM pertanian baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks-rutin) dan 4 program pelaksanaan (eks-pembangunan).
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 adalah sebanyak 19 kegiatan yang dijabarkan dalam 50 sub kegiatan.
3. Terdapat 1 sub kegiatan yang terkait Pengarusutamaan Gender yaitu sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Kegiatan tersebut secara eksplisif dilaksanakan untuk menjawab isu gender yang ada di bidang pertanian dimana peran serta perempuan dalam kegiatan usaha tani maupun dalam kelembagaan tani masih rendah. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan ini peran serta wanita dalam

pembangunan pertanian dapat meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya kelompok wanita tani dan meningkatnya jumlah wanita yang tergabung dalam kelembagaan tani.

4. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 27.990.564.286,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun rencana program kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Fokus pada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja; tertib administrasi dan pelaporan keuangan; serta sarana dan prasarana aparatur.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Fokus kegiatan pada peningkatan sarana pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2023 yaitu jumlah produksi tanaman pangan sebesar 407.536 Ton dan hortikultura sebesar 23.857 ton.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Fokus diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian. Kegiatan ini untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2023 yaitu jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Fokus kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis, serta pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Kegiatan tersebut untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2023 yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 85%.

5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Fokus pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2023 yaitu Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian sebesar 10% (pertanian) dan 8% (peternakan).
6. Program Penyuluhan Pertanian Fokus pada kegiatan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian baik kelembagaan petani maupun kelembagaan penyuluh. Peningkatan kapasitas petani juga diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda di sector pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2023 yaitu Persentase peningkatan kelas kelompok tani dan penyuluh sebesar 1%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasaman Barat serta Renstra tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan (seperti APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, DAK, dll) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 5 (Lima) program yang terdiri dari 20 (Dua puluh) kegiatan dan 50 (Lima puluh) Sub Kegiatan dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 27.990.564.286,- (*Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah*), sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 (T-C. 33)
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								27.990.564.286			27.583.565.658		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.593.389.521			8.629.323.416		
3	27	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								57.000.000			60.000.000		
3	27	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan DTPHP yang disusun (Dokumen Renstra, Renja, RTP, PK, RKA, RKA Perubahan), buku database	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Pasbar	100 %	7 dokumen	7 dokumen	52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55.000.000
3	27	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD, LAKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Pasbar	100 %	2 dokumen	7 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.000.000
3	27	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.748.239.521			7.766.763.416		
3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Kab. Pasbar	100 %	79 PNS	79 orang	7.575.239.521	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.588.763.416
3	27	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Kab. Pasbar	100 %	7 orang	79 orang	83.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	83.000.000
3	27	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Kab. Pasbar	100 %	12 bulan	79 orang	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	95.000.000

3	27	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								72.000.000					80.000.000	
3	27	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan administrasi dan pengamanan BMD pada DTPHP	Jumlah ASN penatausahaan BMD	Kab. Pasbar	100 %	3 THL	2 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55.000.000
3	27	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN penatausahaan BMD	Jumlah ASN penatausahaan BMD	Kab. Pasbar	100 %	2 ASN	2 orang	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25.000.000
3	27	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								45.000.000					35.000.000	
3	27	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	Kab. Pasbar	100 %	225 ASN	4 orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
3	27	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	Kab. Pasbar	100 %	44 orang	4 orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	20.000.000
3	27	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	Kab. Pasbar	100 %	4 orang	4 orang	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15.000.000
3	27	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								213.000.000					213.000.000	
3	27	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kanto	Kab. Pasbar	100 %	1 paket	12 bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.000.000

3	27	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kanto	Kab. Pasbar	100 %	1 paket	12 bulan	77.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	77.000.000
3	27	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kanto	Kab. Pasbar	100 %	1 paket	12 bulan	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.000.000
3	27	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map yang dibutuhkan	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kanto	Kab. Pasbar	100 %	1 paket	12 bulan	26.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	26.000.000
3	27	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kanto	Kab. Pasbar	100 %	12 bulan	12 bulan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100.000.000
3	27	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								40.000.000					46.000.000	
3	27	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	Kab. Pasbar	100 %	2 unit	2 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	23.000.000
3	27	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	Kab. Pasbar	100 %	1 paket	2 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	23.000.000

3	27	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								113.150.000					113.150.000	
3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	Kab. Pasbar	100 %	12 bulan	12 bulan	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	80.000.000
3	27	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa pembersihan landscape kantor	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	Kab. Pasbar	100 %	1 paket	12 bulan	33.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	33.150.000
3	27	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								305.000.000					315.410.000	
3	27	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	Kab. Pasbar	100 %	3 THL 74 unit	74 unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100.000.000
3	27	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas	Kab. Pasbar	100 %	74 unit	74 unit	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	65.205.000
3	27	01	2,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Alat Besar yang akan dilakukan pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas	Kab. Pasbar	100 %	2 unit	74 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	65.205.000

3	27	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang mendapat pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas	Kab. Pasbar	100 %	30 unit	74 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	20.000.000
3	27	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas	Kab. Pasbar	100 %	30 unit	74 unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15.000.000
3	27	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas	Kab. Pasbar	100 %	1 paket	74 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	50.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							9.177.300.000				10.095.030.000		
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							3.033.000.000				3.595.030.000		
3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Frekuensi pengawasan sarana pendukung pertanian	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Kab. Pasbar	28,25,153 003	,21629b61u 1la,9n477,	121525b3u, 2la6n58 ton	2.033.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,15 3003	,269611,29,4707,,10 23505,030,206

3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Kab. Pasbar	28,25,153 003	,21629b61u 1la,9n477,	121525b3u, 2la6n58 ton	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,15 3003	,269611,19,417878,, 1020505,030,206
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								1.654.300.000	1.800.000.000				
3	27	02	2,02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	Kab. Pasbar	28,25,153 003	,246V9a6r1i e1t,9a4s77,	1235v5a3r,i2 e6ta5s8 ton	524.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,15 3003	,269611,9467070,, 1020505,030,206
3	27	02	2,02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah varietas yang meningkat kualitasnya	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	Kab. Pasbar	28,25,153 003	,246V9a6r1i e1t,9a4s77,	1235v5a3r,i2 e6ta5s8 ton	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,15 3003	,269611,9467070,, 1020505,030,206

3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah varietas yang dimanfaatkan SDG nya	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	Kab. Pasbar	28,25,153 003	,246V9a6r1ie1t,9a4s77,	1235v5a3r,i2e6ta5s8 ton	580.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,15 3003	,269611,9467070,,10 20505,030,206
3	27	02	2,03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								280.000.000			310.000.000	
3	27	02	2,03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah kecamatan yang diawasi	Jumlah kecamatan yang diawasi	Kab. Pasbar	28,25,153 003	,21619K6e1c1a,9m4a7t7a,	1n21515k3e,2c6am58at oa	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,15 3003	,269611,9417670,,10 20505,030,206
3	27	02	2,03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah kecamatan yang dipantau peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah kecamatan yang diawasi	Kab. Pasbar	28,25,153 003	,21619K6e1c1a,9m4a7t7a,	1n21515k3e,2c6am58at oa	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,15 3003	,269611,9417570,,10 20505,030,206

3	27	02	2,04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer									310.000.000					330.000.000
3	27	02	2,04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah pemeriksaan toko obat hewan	Jumlah pemeriksaan toko obat hewan	Kab. Pasbar	28,25,153 003	,269611,947 7,	12553,2658 ton	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,15 3003	,269611,9417870,,10 20505,030,206
3	27	02	2,04	02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah pengawasan atas penyimpangan pada toko obat hewan	Jumlah pengawasan atas penyimpangan pada toko obat hewan	Kab. Pasbar	28,25,153 003	,269611,947 7,	12553,2658 ton	140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,15 3003	,269611,9417570,,10 20505,030,206
3	27	02	2,05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota									150.000.000					160.000.000
3	27	02	2,05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Frekuensi pengawasan terhadap kawasan ternak	Frekuensi pengawasan benih	Kab. Pasbar	28,25,153 003	,21629b61u 1la,9n477,	121525b3u, 2la6n58 ton	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	28,25,15 3003	,269611,9417670,,10 20505,030,206

3	27	03	2,02	Pembangunan Prasarana Pertanian								5.747.500.000					4.077.250.000	
3	27	03	2,02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	Kab. Pasbar	69,8,15,20,11,unit,unit,unit	7,1,1,1,1 km,k,u ² n ⁰ it ⁰ ,u ^m n ⁱ t,unit	m,unit,km 20 paket	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69,8,15,20,11,unit,unit,unit	7,1,1,1,1 km,km,unit,k,unit,unit,u ⁴ n ⁵ it ⁰ ,000,000
3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	Kab. Pasbar	69,8,15,20,11,unit,unit,unit	7,1,1,1,1 km,k,unit,unit,unit	m ₂ ,u ₀ n ₀ it ₀ ,k ₀ ,m ₀	1.400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69,8,15,20,11,unit,unit,unit	7,1,1,1,1 km,k ₀ m ₀ ,k ₀ ,m ₀ ,u ₀ n ₀ it ₀ ,k ₀ ,unit,unit,unit
3	27	03	2,02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah dam parit yang dibangun	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	Kab. Pasbar	69,8,15,20,11,unit,unit,unit	7,1,1,1,1 km,k,u ¹ n ⁵ it ⁰ ,u ⁿ n ⁰ it,unit	m,unit,km 20 paket	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69,8,15,20,11,unit,unit,unit	7,1,1,1,1 km,km,unit,k,unit,unit ¹ ,u ⁵ n ⁰ it ⁰ ,000,000
3	27	03	2,02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan yang dibangun/dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	Kab. Pasbar	69,8,15,20,11,unit,unit,unit	7,1,1,1,1 km,k,u ¹ n ¹ it ⁰ ,u ⁿ n ⁰ it,unit	m,unit,km 20 paket	1.250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69,8,15,20,11,unit,unit,unit	7,1,1,1,1 km,km,unit,k,unit,unit,u ⁶ n ⁰ it ⁰ ,000,000

3	27	03	2,02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/dipelihara Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	Kab. Pasbar	69,8,15,20,11,unit,unit,unit	7 ¹ ,1 ⁸ ,1 ⁸ ,1 ⁸ ,1 ⁸ ,1 ⁸ ,unit,km,unit,km 20 paket	1.197.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69,8,15,20,11,unit,unit,unit	7,1
---	----	----	------	----	--	---	--	---	-------------	------------------------------	---	---------------	---	---	------------------------------	---

3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							3.019.374.765				3.321.312.242		
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							3.019.374.765				3.321.312.242		
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/bimtek	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasbar	1-1 %	101 orang	11 BPP	1.969.374.765	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	2.200.000.000
3	27	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasbar	1-1 %	100 kelompok	11 BPP	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	521.312.242
3	27	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasbar	1-1 %	12 bulan	11 BPP	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	400.000.000
3	27	07	2,01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasbar	1-1 %	12 bulan 17 THL	11 BPP	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	200.000.000
TOTAL													27.990.564.286				27.583.565.658	

Selain program-program tersebut diatas, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat juga mengajukan e-proposal untuk program/kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 dari Kementerian Pertanian melalui e-proposal. Sedangkan untuk program kegiatan DAK, untuk tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat mendapat alokasi DAK Aspirasi Tahun 2023 seperti tabel 4.2 dibawah ini:

1. Usulan APBN 2023

Kegiatan	: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Komponen	: Fasilitas Bantuan
KRO	: Data dan Informasi Publik
Sub Komponen	: Tanpa Sub Komponen
RO	: Informasi Pasar Komoditas Hortikultura
Komoditas	: Semua Komoditas Hortikultura

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Pasaman	1	15.052.000	15.052.000

Kegiatan	: Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
Komponen	: Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
KRO	: Sarana Pengembangan Kawasan
Sub Komponen	: Tanpa Sub Komponen
RO	: Kawasan Alpukat
Komoditas	: Buah Lainnya

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
KARYA BERSAMA	Luhak Nan Duo	50	6.150.000	307.500.000

Kegiatan	: Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
Komponen	: Prasarana Pengolahan Daging
KRO	: Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Komponen	: Tanpa Sub Komponen
RO	: Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Komoditas	: Semua Komoditas Peternakan

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
KWT AISYAH	Luhak Nan Duo	1	100.000.000	100.000.000

Kegiatan	: Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
Komponen	: Sarana Pengolahan Daging
KRO	: Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Komponen	: Tanpa Sub Komponen
RO	: Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Komoditas	: Semua Komoditas Peternakan

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
----------	-----------	--------	-----------	-------

Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/Tanaman Pangan
 Komponen : Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Jagung
 KRO : Sarana Pengembangan Kawasan
 Sub Komponen : Budidaya Jagung Komposit/Jagung Pangan
 RO : Kawasan Jagung
 Komoditas : Jagung

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
PELITA I	Pasaman	30	1.510.000	45.300.000

Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/Tanaman Pangan
 Komponen : Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya padi
 KRO : Sarana Pengembangan Kawasan
 Sub Komponen : Intensifikasi Padi Sawah Produktivitas Rendah
 RO : Kawasan Padi
 Komoditas : Padi

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
BANJAR SARI II	Kinali	30	1.755.000	52.650.000
BANCAH TALANG	Kinali	20	1.755.000	35.100.000

Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
 Komponen : Combine Harvester
 KRO : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 Sub Komponen : Combine Harvester Sedang
 RO : Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
 Komoditas : Padi

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
SRI MULYA	Ranah Batahan	1	175.034.000	175.034.000

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
 Komponen : Tanpa Komponen
 KRO : Sarana Pengembangan Kawasan
 Sub Komponen : Melaksanakan Penyaluran Benih Padi Bersertifikat
 RO : Area penyaluran benih padi
 Komoditas : Padi

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
KARYA BARU	Kinali	5	275.000	1.375.000
SAIYO	Pasaman	20	275.000	5.500.000
PADI MENGUNING II	Kinali	10	275.000	2.750.000
SIALANG JAYA II	Kinali	25	275.000	6.875.000
SAROHA	Pasaman	15	275.000	4.125.000
SRI MULYA	Ranah Batahan	25	275.000	6.875.000
JALAN LURUS	Ranah Batahan	25	275.000	6.875.000

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
BANJAR SARI II	Kinali	20	275.000	5.500.000
SIALANG JAYA III	Kinali	25	275.000	6.875.000
TUNAS HARAPAN	Pasaman	10	275.000	2.750.000
CINTA DAMAI	Pasaman	10	275.000	2.750.000
PELITA I	Pasaman	20	275.000	5.500.000
BANJAR ALANG	Sungai Beremas	13	275.000	3.575.000
RANAH HARAPAN	Pasaman	20	275.000	5.500.000
SIALANG JAYA IV	Kinali	25	275.000	6.875.000
BUDI LUHUR	Kinali	10	275.000	2.750.000
BANJAR SARI	Kinali	25	275.000	6.875.000
RANTAU PANJANG IV	Kinali	15	275.000	4.125.000
BATANG KABAU ALIN II	Gunung Tuleh	8	275.000	2.200.000
HARAPAN MAJU	Pasaman	20	275.000	5.500.000
USAHA MAJU	Kinali	25	275.000	6.875.000
KARYA MUKTI	Ranah Batahan	15	275.000	4.125.000
PADI MENGUNING	Kinali	10	275.000	2.750.000
JALUR TENGAH	Ranah Batahan	5	275.000	1.375.000
KARYA BASAMO	Sungai Beremas	25	275.000	6.875.000
SALAK LAWEH BARAT	Ranah Batahan	20	275.000	5.500.000
SIDORUKUN	Ranah Batahan	25	275.000	6.875.000
SIALANG JAYA V	Kinali	25	275.000	6.875.000
PELITA II	Pasaman	10	275.000	2.750.000
MAJU SAROHA	Lembah Malintang	20	275.000	5.500.000
SAKINAH	Gunung Tuleh	10	275.000	2.750.000
BATANG KABAU ALIN III	Gunung Tuleh	8	275.000	2.200.000
SEI ABUAK II	Pasaman	20	275.000	5.500.000
BAHAGIA TANI	Lembah Malintang	20	275.000	5.500.000
CINTA MAKMUR	Pasaman	30	275.000	8.250.000
SAHATA	Pasaman	20	275.000	5.500.000
SEI ABUAK I	Pasaman	25	275.000	6.875.000
KAMPUNG SOLOK I	Gunung Tuleh	15	275.000	4.125.000
HARAPAN BARU	Pasaman	10	275.000	2.750.000
SRI REZEKI	Ranah Batahan	28	275.000	7.700.000
SIALANG JAYA I	Kinali	25	275.000	6.875.000
EMBUN PAGI	Pasaman	20	275.000	5.500.000
HIDUP BARU	Kinali	15	275.000	4.125.000
BATANG KABAU ALIN I	Gunung Tuleh	7	275.000	1.925.000
KAMPUNG BUKIK	Pasaman	10	275.000	2.750.000

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
KAMPUNG SOLOK	Gunung Tuleh	10	275.000	2.750.000
BANJA ANAU	Pasaman	15	275.000	4.125.000
BANJA DURIAN AMEH	Pasaman	7	275.000	1.925.000

Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
 Komponen : Perontok/Pemipil
 KRO : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 Sub Komponen : Power Thresher
 RO : Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
 Komoditas : Padi

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
SAWAH PANJANG	Sungai Beremas	1	23.700.000	23.700.000
HARAPAN MAJU	Pasaman	1	23.700.000	23.700.000
HARAPAN JAYA	Koto Balingka	1	23.700.000	23.700.000
MAJU SEJAHTERA	Talamau	1	23.700.000	23.700.000
PELITA I	Pasaman	1	23.700.000	23.700.000

Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
 Komponen : Perontok/Pemipil
 KRO : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 Sub Komponen : Corn Sheller
 RO : Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
 Komoditas : Jagung

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
KAMPUNG BARU HARAPAN	Pasaman	1	27.919.000	27.919.000
SEMOGA JAYA	Pasaman	1	27.919.000	27.919.000

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
 Komponen : Tanpa Komponen
 KRO : Sarana Pengembangan Kawasan
 Sub Komponen : Melaksanakan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat
 RO : Area Penyaluran Benih Jagung
 Komoditas : Jagung

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
KAYU ARAO	Sungai Beremas	15	630.000	9.450.000
SAMPURAN BETUNG	Sungai Aur	20	630.000	12.600.000
KARYA MAKMUR	Sungai Aur	15	630.000	9.450.000
HARAPAN TANI	Sungai Aur	15	630.000	9.450.000
AMANAHA	Sungai Aur	40	630.000	25.200.000
AMANAHA SEJAHTERA	Sungai Aur	50	630.000	31.500.000
TIMBALUN HARAPAN NAMI	Sungai Aur	30	630.000	18.900.000

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
DUA SETANGKAL	Sungai Beremas	50	630.000	31.500.000
BAHAGIA TANI	Lembah Malintang	35	630.000	22.050.000
HIDUP BARU	Kinali	30	630.000	18.900.000
USAHA BERKAH	Sungai Aur	40	630.000	25.200.000
TALANG PUTIH	Sungai Beremas	60	630.000	37.800.000
BANJAR BOLAK	Sungai Aur	50	630.000	31.500.000
KARYA BERSAMA	Sungai Beremas	50	630.000	31.500.000
SONTANG SEJAHTERA	Sungai Aur	30	630.000	18.900.000
AUR KUNING SEJATI	Pasaman	30	630.000	18.900.000
MAJU SAROHA	Lembah Malintang	40	630.000	25.200.000
CINTA MAKMUR	Pasaman	50	630.000	31.500.000
KAMPUNG SOLOK	Gunung Tuleh	25	630.000	15.750.000
SEJATI	Sasak Ranah Pasisie	25	630.000	15.750.000
SAKINAH	Gunung Tuleh	20	630.000	12.600.000
BATANG KABAU ALIN II	Gunung Tuleh	15	630.000	9.450.000
SAIYO	Pasaman	30	630.000	18.900.000
RAPPADE TANI	Sungai Aur	10	630.000	6.300.000
MULTI SARI PRIMA	Sungai Aur	50	630.000	31.500.000
BANCAH KARIANG	Kinali	50	630.000	31.500.000
SUKA MAJU	Sungai Aur	50	630.000	31.500.000
BANJA DURIAN AMEH	Pasaman	30	630.000	18.900.000
FAMILI	Sungai Aur	15	630.000	9.450.000
TIRTA MINA SAIYO	Pasaman	20	630.000	12.600.000
AMANAH BUKIT MALINTANG	Sungai Aur	20	630.000	12.600.000

Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Komponen : Combine Harvester

KRO : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Sub Komponen : Combine Harvester Kecil

RO : Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

Komoditas : Padi

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
SAWAH PANJANG	Sungai Beremas	1	146.177.000	146.177.000
BANJAR ALANG	Sungai Beremas	1	146.177.000	146.177.000

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
Komponen : Penyediaan Asintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan
KRO : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Komponen : Hand Sprayer (Elektrik)
RO : Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan
Komoditas : Semua Komoditas Tanaman Pangan

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
SIMPANG BADANYUIK	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
TANJUNG HARAPAN	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
RIMBO GANTIANG	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
RANTAU PANJANG IV	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
MATA AIR	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
KABUT PUTIH	Pasaman	1	1.000.000	1.000.000
KAMPUNG BARU HARAPAN	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
SIALANG JAYA I	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
KWT PUTRI SAIYO	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
ROJO KOYO	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
KARYA MUDA	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
RANTAU PANJANG I	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
BANGUN BARU	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
CINTA MAKMUR	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
AUR KUNING SEJATI	Pasaman	1	1.000.000	1.000.000
PULAU HARAPAN	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
RUKUN SENTOSA	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
SIALANG JAYA IV	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
KAMPUNG MANIH	Pasaman	1	1.000.000	1.000.000
KWT MANDIRI SEJAHTERA	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
POROS SAIYO	Sasak Ranah Pasisie	5	1.000.000	5.000.000
FAMILI SAIYO	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
SEMOGA JAYA	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
DAGANG SAIYO	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
SETIA KAWAN	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
TUNAS BARU	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
MELATI INDAH	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
SUBUR MAKMUR	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
KWT KHAIRUNNISA	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
TUNAS HARAPAN	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
CINTA KASIH	Pasaman	1	1.000.000	1.000.000
HARAPAN JAYA	Kinali	5	1.000.000	5.000.000

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
HARAPAN BARU	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
BANJA HARAPAN I	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
RANTAU PANJANG II	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
KWT MANDIRI	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
PELITA II	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
RIMBO JAO	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
BANCAH KELADI	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
PELITA I	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
TANJUNG JAYA	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
BATANG SIANIK	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
KOTO PADANG SEJATI	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
CINTA DAMAI	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
PERSAUDARAAN KELUARGA SEJAHTERA	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
KWT LANTANA CAMARA	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
SUBUR JAYA	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
SEI ABUAK II	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
BANJAR SARI	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
JATI SEPAKAT	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
KAMPUNG PANDAN	Pasaman	1	1.000.000	1.000.000
RANG CHANIAGO	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
BATANG KINALI	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
TERATAI	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
SIALANG JAYA II	Kinali	1	1.000.000	1.000.000
SAKATO	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
BUDI LUHUR	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
KWT TABEK SAMBILAN	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
SEI ABUAK I	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
PIONER SAIYO	Lembah Malintang	5	1.000.000	5.000.000
KWT SAIYO SAKATO	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
BANJA HARAPAN II	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
HULU PINAGA	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
HARAPAN MAJU	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
DURIAN BEGA	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
TUNAS MUDA BT. SAMAN	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
BATANG MASIANG	Kinali	5	1.000.000	5.000.000
LEMBAH SEJATI	Pasaman	1	1.000.000	1.000.000
SEPAKAT KP. PISANG	Kinali	5	1.000.000	5.000.000

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
SUNGAI JERNIH	Pasaman	1	1.000.000	1.000.000
KWT MUMTAZA	Pasaman	5	1.000.000	5.000.000
AUR SERUMPUN	Kinali	5	1.000.000	5.000.000

Kegiatan : Fasilitas Pembiayaan Pertanian
Komponen : Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
KRO : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Komponen : Tanpa Sub Komponen
RO : Asuransi Pertanian
Komoditas : Padi

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
RANTAU PANJANG IV	Kinali	40	144.000	5.760.000
BANJAR SARI	Kinali	50	144.000	7.200.000
SIDORUKUN	Ranah Batahan	100	144.000	14.400.000
BANJA HARAPAN I	Pasaman	50	144.000	7.200.000
SRI MULYA	Ranah Batahan	100	144.000	14.400.000
SRI REZEKI	Ranah Batahan	50	144.000	7.200.000
PADI MENGUNING	Kinali	50	144.000	7.200.000
SIALANG JAYA I	Kinali	50	144.000	7.200.000

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
Komponen : Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan
KRO : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Komponen : Traktor Roda 2 (Rotary)
RO : Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan
Komoditas : Semua Komoditas Tanaman Pangan

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
SUKA MAKMUR	Luhak Nan Duo	1	38.000.000	38.000.000
RANTAU PANJANG II	Kinali	1	38.000.000	38.000.000
AIA PINANG	Talamau	1	38.000.000	38.000.000
DURIAN BEGA	Pasaman	1	38.000.000	38.000.000

Kegiatan : Fasilitas Pembiayaan Pertanian
Komponen : Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)
KRO : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Komponen : Tanpa Sub Komponen
RO : Asuransi Usaha Ternak (AUT)
Komoditas : Sapi

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
KARYA BARU	Kinali	20	160.000	3.200.000
SUMBER REZEKI	Luhak Nan Duo	20	160.000	3.200.000

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
Komponen : Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Hortikultura
KRO : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Komponen : Cultivator
RO : Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura
Komoditas : Semua Komoditas Hortikultura

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
SARIAK LAWEH	Kinali	1	18.000.000	18.000.000
MAJU SEJAHTERA	Talamau	1	18.000.000	18.000.000
BATANG KINALI	Kinali	1	18.000.000	18.000.000
SIDOMULYO II	Kinali	1	18.000.000	18.000.000
KOTO ALAM SEJATI	Pasaman	1	18.000.000	18.000.000
SUMBER REZEKI	Pasaman	1	18.000.000	18.000.000
ELOK BASAMO	Gunung Tuleh	1	18.000.000	18.000.000
SEMANGAT BARU	Kinali	1	18.000.000	18.000.000
BATANG LINGKIN BERSATU	Pasaman	1	18.000.000	18.000.000
KWT JAYA OPHIR	Luhak Nan Duo	1	18.000.000	18.000.000
BANCAH BUNGO TANJUANG	Pasaman	1	18.000.000	18.000.000
SEJAHTERA (KWT)	Luhak Nan Duo	1	18.000.000	18.000.000
RESTU KARYA	Kinali	1	18.000.000	18.000.000
TIRTO SARI	Luhak Nan Duo	1	18.000.000	18.000.000
KAYA TANI	Lembah Malintang	1	18.000.000	18.000.000
DAGANG SAIYO	Pasaman	1	18.000.000	18.000.000

Kegiatan : Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
Komponen : Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Kabupaten)
KRO : Pelayanan Publik Lainnya
Sub Komponen : Tanpa Sub Komponen
RO : Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi
Komoditas : Semua Komoditas

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Pasaman	1	104.420.000	104.420.000

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
Komponen : Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan
KRO : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Komponen : Pompa Air (Ukuran 4 inci)
RO : Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan
Komoditas : Semua Komoditas Tanaman Pangan

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
TANJUNG JAYA	Pasaman	1	23.000.000	23.000.000

PELITA II Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost Rp.000.000	Total Rp.000.000
SEI ABUAK II	Pasaman	5	23.000.000	115.000.000
SEI ABUAK I	Pasaman	1	23.000.000	23.000.000
SETIA KAWAN	Pasaman	1	23.000.000	23.000.000
CINTA MAKMUR	Pasaman	1	23.000.000	23.000.000
HARAPAN BARU	Pasaman	1	23.000.000	23.000.000
KAMPUNG BARU HARAPAN	Pasaman	1	23.000.000	23.000.000
RIMBO GANTIANG	Pasaman	1	23.000.000	23.000.000
DURIAN BEGA	Pasaman	1	23.000.000	23.000.000
PELITA I	Pasaman	1	23.000.000	23.000.000

Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
Komponen : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
KRO : OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Komponen : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
RO : Jaringan Irigasi Tersier
Komoditas : Semua Komoditas Tanaman Pangan

Penerima	Kecamatan	Volume	Unit Cost	Total
SIALANG JAYA III	Kinali	1	75.000.000	75.000.000
RANTAU PANJANG IV	Kinali	1	75.000.000	75.000.000
AIA GARINGGIANG	Talamau	1	75.000.000	75.000.000
SIDORUKUN	Ranah Batahan	1	75.000.000	75.000.000
SRI REZEKI	Ranah Batahan	1	75.000.000	75.000.000

2. Kegiatan DAK Aspirasi 2023 (Sub Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan)

TOTAL APPROVED SIMBOL USULAN DAERAH

Rp 0

Jumlah Usulan: 1

Non-Appeal

TOTAL APPROVED SIMBOL USULAN ASPIRASI DPE

Rp 1.000.000.000

Jumlah Approved: 4

Disetujui

DETAIL RINCIAN

Search

NO	KODE	NOMINATURAL DETAIL RINCIAN	VOLUME/UNIT COST USULAN 2023	HASIL PENILAIAN		
				STATUS	VOLUME/UNIT COST	
1	09.02.02.01.1312.090.001	KOTO BARU (Kecamatan LUMAKIHAN DUD, Desa KOTO BARU)	0,00 / 0,0	X	1 200.000.000,0	
2	09.02.02.01.1312.110.003	NAGARI PERSIARAN III KOTO (Kecamatan KINALI, Desa NAGARI PERSIARAN IV KOTO)	0,00 / 0,0	X	1 200.000.000,0	
3	09.02.02.01.1312.110.012	NAGARI PERSIARAN SUGUNANTI (Kecamatan KINALI, Desa NAGARI PERSIARAN SUGUNANTI)	0,00 / 0,0	X	1 200.000.000,0	
4	09.02.02.01.1312.110.014	NAGARI PERSIARAN BUKUK (Kecamatan KINALI, Desa NAGARI PERSIARAN BUKUK)	0,00 / 0,0	X	2 200.000.000,0	

DAFTAR 2023

TOTAL APPROVED DIBAWAH USULAN DIBAWAH

0

Jumlah Usulan: 0

TOTAL APPROVED DIBAWAH USULAN KEBERHASILAN DIBAWAH

1.200.000.000

Jumlah Approved: 0

DETAIL RINCIAN

Search

NO	KODE	NOMENKLATUR DETAIL RINCIAN	VOLUME/UNIT COST USULAN 2023	HASIL PENILAIAN	
				ENTITAS	VOLUME/UNIT COST
01	09.02.01.01.1312.070.004	NAGARI PERSAPUAN SAMPANG TAMBOK ABU KAJAI (Desa: Kecamatan TALAMAU, Desa NAGARI PERSAPUAN SAMPANG TAMBOK ABU KAJAI)	0,00		0
			0,0		200.000.000,0
02	09.02.01.01.1312.070.005	NAGARI PERSAPUAN KAJAI SELATAN (Desa: Kecamatan TALAMAU, Desa NAGARI PERSAPUAN KAJAI SELATAN)	0,00		0
			0,0		200.000.000,0
03	09.02.01.01.1312.070.006	NAGARI PERSAPUAN TINGGAS HADABAH (Desa: Kecamatan TALAMAU, Desa NAGARI PERSAPUAN TINGGAS HADABAH)	0,00		0
			0,0		200.000.000,0
04	09.02.01.01.1312.000.013	NAGARI PERSAPUAN LUBUK LAUDIA ALA KUBANG (Desa: Kecamatan TALAMAU, Desa NAGARI PERSAPUAN LUBUK LAUDIA ALA KUBANG)	0,00		0
			0,0		200.000.000,0
05	09.02.01.01.1312.090.002	NAGARI PERSAPUAN GAB MAJO (Desa: Kecamatan LUMAH NABU, Desa NAGARI PERSAPUAN GAB MAJO)	0,00		0
			0,0		200.000.000,0

DAK 2023

Menu

Help

TOTAL APPROVED DIBAWAH USULAN DIBAWAH

0

Jumlah USULAN: 0

0

TOTAL APPROVED DIBAWAH USULAN KEBERHASILAN

1.400.000.000

Jumlah APPROVED: 0

0

DETAIL RINCIAN

Search

NO	KODE	NOMENKLATUR DETAIL RINCIAN	VOLUME/UNIT COST USULAN 2023	HASIL PENILAIAN	
				STATUS	VOLUME/UNIT COST
1	09.02.01.01.1312.020.002	BATANG (Desa: Kecamatan KAJAI BATANG, Desa BATANG)	0,00 0,0	0	200.000.000,0
2	09.02.01.01.1312.070.004	NAGARI PERSAPUAN SAMPANG TAMBOK ABU KAJAI (Desa: Kecamatan TALAMAU, Desa NAGARI PERSAPUAN SAMPANG TAMBOK ABU KAJAI)	0,00 0,0	0	200.000.000,0
3	09.02.01.01.1312.070.006	NAGARI PERSAPUAN SUNGAI JERAM TALU (Desa: Kecamatan TALAMAU, Desa NAGARI PERSAPUAN SUNGAI JERAM TALU)	0,00 0,0	0	200.000.000,0
4	09.02.01.01.1312.110.014	NAGARI PERSAPUAN BUNYUK (Desa: Kecamatan BUNYUK, Desa NAGARI PERSAPUAN BUNYUK)	0,00 0,0	0	200.000.000,0

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian dan Peternakan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Sukomananti, 2023

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Pasaman Barat

Dh DODDY SAN ISMAIL, MM

Pembina /IV.a

NIP. 19850331 201101 1 001

